



Kantong Parkir di Malioboro Perlu Ditambah

JOGJA—Ketersediaan kantong parkir dan akses bagi pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak sebelum Malioboro dijadikan kawasan pedestrian penuh pada 2020.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

- ▶ Penurunan omzet para pemilik toko bisa sampai 50%.
- ▶ Dalam uji coba pada Selasa Pon lalu, para pedagang kaki lima tidak merasakan penurunan omzet secara signifikan.

Pemilik toko di kawasan Malioboro keberatan jika penerapan Malioboro bebas kendaraan secara penuh belum dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPAMY), Sodikin, mengatakan kebijakan Malioboro jadi kawasan pedestrian jika tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, sama saja membunuh pemilik toko secara perlahan. Tidak adanya akses kendaraan sama saja menekan terlalu banyak pengunjung dan pembeli toko.

"Mereka [pembeli] bingung enggak tahu parkir di mana. Akhirnya cuma muter-muter di luar Malioboro. Kelihatannya ramai tapi tidak ada yang masuk. Jangankan wisatawan, kami yang asli Jogja saja masih banyak yang tidak tahu harus parkir mana," ujarnya, Selasa (10/12).

Ia mengungkapkan selama beberapa kali uji coba Selasa Wage, penurunan omzet para pemilik toko bisa sampai 50%.

Kantong Parkir...

Selain karena tidak ada akses kendaraan, para pengunjung di Selasa Wage bukan merupakan pembeli toko, sebab kebanyakan warga Jogja. "Orang Jogja jarang beli di Malioboro, mending di Jalan Solo, lebih mudah bisa parkir di depan toko," katanya.

Selain menurutnya pengunjung, operasional toko juga menjadi persoalan. Jika kendaraan tidak bisa masuk, para pemilik toko tidak tahu bagaimana harus *loading* barang, terutama toko yang letaknya di tengah. "Uji coba belum terlalu terasa karena hanya satu hari, kalau setiap hari tentu jadi masalah," ungkapnya.

Sodikin berharap kebijakan Malioboro bebas kendaraan secara penuh belum bisa diterapkan dalam waktu dekat, setidaknya sebelum disediakan infrastruktur pendukung. Ia menyebutkan infrastruktur yang paling penting adalah kantong parkir di sekitar Malioboro.

Di sepanjang Malioboro, kata dia, seharusnya disediakan minimal enam kantong parkir representatif untuk mengakomodasi kebutuhan toko dan pengunjung. "Kami sudah sediakan tempat parkir, tapi tidak bisa dipakai kalau akses kendaraan ditutup, ujarnya.

Namun jika memang kebijakan ini harus diterapkan, ia berharap Pemkot tidak menerapkannya sepanjang hari, melainkan hanya di jam tertentu, semisal pada sore hari. Ia melihat tidak ada orang

berjalan-jalan di Malioboro waktu pagi sampai siang, sebab terlampau panas. Maka kebijakan itu tidak akan terlalu berdampak di waktu tersebut.

Sebelumnya, Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menargetkan penerapan Malioboro bebas kendaraan secara penuh pada 2020 mendatang, tetapi belum bisa direalisasikan pada awal tahun. Waktu yang memungkinkan adalah pertengahan atau akhir 2020. Namun Aji memperkirakan sinkronisasi berbagai pihak yang berkepentingan di Malioboro mulai dari komunitas dengan Pemda DIY serta dampak lalu lintas akan terselesaikan pada pertengahan 2020.

Harapannya setelah tercapai sinkronisasi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi komunitas Malioboro maupun masyarakat pengguna jalan yang terdampak dari penutupan Malioboro.

Akses Pedagang

Pendapat agak berbeda disampaikan, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Desio Hartonowati. Dia mengatakan dalam uji coba pada Selasa Pon lalu, para pedagang tidak merasakan penurunan omzet secara signifikan. "Masih ramai, walaupun ada penurunan, sangat sedikit," ujarnya.

Para pedagang, kata dia, mendukung kebijakan Pemkot, asalkan kebijakan itu telah dipikirkan

dengan matang. Ia berharap pemkot menyediakan fasilitas untuk tetap mempermudah akses masuk PKL dan pengunjung. "Semisal dibuatkan *id card* khusus pedagang, biar kita tetap bisa *loading* barang," katanya.

Selain itu, ia juga berharap Pemkot bisa menambah kantong parkir agar pengunjung tidak kebingungan harus parkir di mana. Menurutnya, tempat parkir yang sudah tersedia selama ini masih kurang mengakomodasi pengunjung Malioboro.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menuturkan selama uji coba, titik kemacetan terjadi di dua jalur, yakni Abu Bakar Ali dan Pasar Kembang. Menurutnya, itu bukan sebab langsung dari jalur pedestrian, melainkan dampak penyeberangan. "Itu pun karena efek penyeberangan dari Jalan Mangkubumi ke Malioboro."

Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIY, Hari Agus Triyono, mengatakan Malioboro semi pedestrian bisa menjadi edukasi masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja, sehingga tidak perlu parkir.

"Harapannya bisa mengubah perilaku masyarakat untuk mengakses Malioboro dengan kendaraan umum atau sepeda. Selasa besok kami ingin melihat kondisi lebih riil. Masyarakat diharapkan sudah terbiasa dengan [kawasan] semi pedestrian."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005